



**RENCANA STRATEGIS  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PEKALONGAN 2020 - 2024**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 ini memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan pencapaian misi Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, yang mana kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 51 (lima puluh satu) Sasaran Kegiatan berdasar pada Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan Agama tahun 2024.



Pekalongan, 28 September 2020  
Kepala

Kasiman Mahmud Desky



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR: 196 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA  
KABUPATEN PEKALONGANTAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);  
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

- Negara/Lembaga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

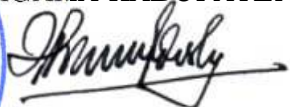
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :
1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan;
  2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 September 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN



  
KASIMAN MAHMUD DESKY

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
BAB I – PENDAHULUAN	1
1. 1 Kondisi Umum	1
1. 1. 1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	2
1. 1. 2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	3
1. 1. 3 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	4
1. 1. 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	7
1. 1. 4. 1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	7
1. 1. 4. 2 Penyuluh Agama yang Kompeten	8
1. 1. 4. 3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	9
1. 1. 4. 4 Penghulu yang Kompeten	13
1. 1. 4. 5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri	14
1. 1. 4. 6 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	15
1. 1. 5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	17
1. 1. 6 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM	19
1. 2 Potensi dan Permasalahan	22
1. 2. 1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	22
1. 2. 2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	23
1. 2. 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	23
1. 2. 4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	24
1. 2. 5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	24
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN	25
2. 1 Tujuan	25
2. 2 Sasaran Kegiatan	26

2.3	Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	34
2.4	Nilai-Nilai Kementerian Agama	51
BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		54
3.1	Target Kinerja	54
3.2	Kerangka Pendanaan	68
PENUTUP		72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kegiatan Outbond Kerukunan Lintas Agama	7
Gambar 1.2	Dokumentasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	8
Gambar 1.3	Dokumentasi Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama	10
Gambar 1.4	Dokumentasi Dialog Antar Umat Beragama	21
Gambar 1.5	Dokumentasi Pelaksanaan Manasik Sepanjang Masa	21
Gambar 1.6	Dokumentasi Pelaksanaan Pembuatan Paspor Kolektif	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Potret Persentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	2
Tabel 1.2	Potret Persentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019	3
Tabel 1.3	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar	8
Tabel 1.4	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	9
Tabel 1.15	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk	9
Tabel 1.6	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah SD	10
Tabel 1.7	Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional	10
Tabel 1.8	Prestasi Penyuluh Agama Islam Non PNS	11
Tabel 1.9	Prestasi KUA	12
Tabel 1.10	Data Tanah dan Bangunan KUA	13
Tabel 1.11	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	14
Tabel 1.12	Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SOC	14
Tabel 1.13	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Pekalongan	16
Tabel 1.14	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	17
Tabel 1.15	Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP	18
Tabel 1.16	Data Nilai Rata-Rata Hasil UN	18
Tabel 1.17	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019	18
Tabel 1.18	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019 Pada Madrasah	19
Tabel 1.19	Indek Pembangunan Zona Integritas	22



## DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	ASEAN Youth Interfaith Camp
Balitbang	Badan Penelitian dan pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	Inter Religion Council
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	Madrasah Young Researchers Super Camp
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOC	Embarkasi Solo
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

# BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada periode Rencana Strategis sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan periode 2020-2024.

## 1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas **empat komponen**, yaitu: **taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- b. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- c. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- d. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- e. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
- f. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
- g. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran. Berikut indikator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

- a. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- b. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
- c. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
- d. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;

- e. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- f. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
- g. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
- h. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah:

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut:

#### **1.1.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama**

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator: 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019, dilihat dari peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama presentase capaian kinerja sudah sangat baik, presentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah berada di angka 90%. Sementara presentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 85%. Capaian tersebut perlu dipertahankan atau bahkan perlu lebih ditingkatkan lagi. Dimana untuk meningkatkan presentase kedua indikator tersebut tentunya tidak terlepas dari peran penyuluh agama. Kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki saat ini masih menyisakan pekerjaan besar untuk periode berikutnya.

Variasi presentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Potret Presentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah**  
**sampai dengan Tahun 2019**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	943.379	2.251	880	837	640	200	948.187
Jumlah Yang Aktif pada	849.042	1.914	528	711	557	150	852.902

Rumah ibadah							
Presentase Keaktifan	90	85	60	85	87	75	90

Sumber: Seksi Bimas Islam

**Tabel 1.2**  
**Potret Presentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Rumah Ibadah	3.520	30	3	3	-	2	3.558
Rumah Ibadah Yang Melakukan Kegiatan Sosial Keagamaan	3.000	25	3	1	-	1	3,030
Presentase Keaktifan Kegiatan Sosial Keagamaan	85	70	70	50	-	50	85

Sumber: Seksi Bimas Islam

### 1.1.2. Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kabupaten Pekalongan serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa: (1) indeks kerukunan umat beragama (indeks KUB) dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama (KUB). Survei kerukunan umat beragama dilakukan Balitbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama pada level Propinsi Jateng yang mencakup tiga dimensi, yaitu: 1. Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.

Peran serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan indeks kerukunan umat Beragama ditahun 2015-2019 adalah mensosialisasikan dan membina kerukunan umat beragama berjalan dinamis dengan pendekatan kegiatan-kegiatan yang melibatkan tokoh agama. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya konflik umat beragama pada periode tahun tersebut.

Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Karena tidak ditemukan konflik umat beragama yang berarti, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Pekalongan kehidupan umat beragamanya sangat harmonis saling menghargai diantara pemeluk agama serta kerukunan antar umat beragama sangat terjaga.

### **1.1.3. Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan**

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argument penting hadirnya moderasi beragama khususnya di Kabupaten Pekalongan adalah keharusan dikarenakan masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama.

Di Kabupaten Pekalongan isu multikultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan bermasyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan hadir dengan berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2015 sampai 2019 kegiatan yang dilakukan adalah:

#### **1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama**

Kegiatan pembinaan diikuti oleh perwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, jajaran dari kepolisian, kodim di wilayah se- Kabupaten Pekalongan. Jumlah peserta sebanyak 30 orang di setiap kegiatan. Pembinaan dilaksanakan 5 kali di tahun 2016-2018. Adapun narasumber diantaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Polresta, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pekalongan, FKPT, Kesbang Kabupaten Pekalongan.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah diketahuinya kondisi riil kerukunan umat beragama, terjadinya tukar informasi kondisi kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Selain itu juga agar para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, Polsek dan Kodim mengetahui alur dan prosedur tata cara pendirian tempat ibadah yang benar, sehingga sosialisasi pembangunan tempat ibadah bisa dilakukan oleh antar lembaga/instansi.

**Gambar 1.1**  
**Outbond Pembinaan FKUB**



**Gambar 1.2**  
**Pembinaan Kerukunan Umat Bergama**



## 2. Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama

Untuk menciptakan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat melalui tri kerukunan Umat Beragama yakni: Kerukunan Intern Umat Beragama; Kerukunan Antar Umat Beragama serta Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah. Salah satu cara menciptakan kondisi kerukunan yaitu melalui kegiatan gerak jalan kerukunan. Gerak jalan diikuti oleh Tokoh Umat Beragama, lembaga keagamaan, serta ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Pekalongan sebanyak kurang lebih 670 peserta. Gerak jalan dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dan Desember 2018.

**Gambar 1.3**  
**Gerak Jalan Kerukunan umat beragama**





### 3. Dialog Kerukunan Umat Beragama extern dan Intern

Kegiatan Dialog diikuti oleh perwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ormas Keagamaan se-Kabupaten Pekalongan. Jumlah peserta sebanyak 30 orang di setiap kegiatan. Adapun narasumber dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Kegiatan sudah terlaksana pada bulan Desember 2019.

**Gambar 1.4**  
**Dialog antar Umat Beragama**



#### **1.1.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan**

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Sebagai institusi vertikal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan institusi di atasnya. Pelaksanaan peningkatan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di Kabupaten Pekalongan diukur dengan indikator berikut, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri.

##### **1.1.4.1. Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar**

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimulasi masyarakat untuk

menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib. Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 1.032 masjid/mushola, 56 gereja Kristen/rumah kebaktian, 20 gereja Katolik/paroki/stasi/kapel, 1 pura, 6 rumah ibadah Buddha (vihara, cetiya, kelenteng, pusdiklat), serta 1 kelenteng/Konghucu. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Ibadah	3.243	3.243	3.450	3.550	3.550

*Sumber: Seksi Bimas Islam*

Indikator rumah ibadah yang memenuhi standar adalah: rumah ibadah yang memenuhi kenyamanan umat dalam beribadah meliputi keamanan, kebersihan, kesehatan dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Sampai dengan akhir periode Renstra ini tempat ibadah yang memenuhi standar berjumlah 3.550 atau 91,61% dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kabupaten Pekalongan, masih perlu banyak perbaikan rumah ibadah yang harus dilakukan di Kabupaten Pekalongan hingga tempat ibadah memenuhi standar pelayanan.

#### **1.1.4.2. Penyuluh Agama yang Kompeten**

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun

persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Islam</b>	257	257	163	163	163
<b>Kristen</b>	0	0	0	0	0
<b>Katolik</b>	0	6	4	3	3
<b>Hindu</b>	0	0	0	0	0
<b>Buddha</b>	0	0	0	0	0
<b>Khonghucu</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>257</b>	<b>263</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>166</b>

Sumber: Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik

**Tabel 1.5**  
**Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
<b>Jumlah Penduduk</b>	943.379	2.251	880	640	200	-	947.350
<b>Penyuluh PNS</b>	11	-	-	-	-	-	11
<b>Penyuluh Non PNS</b>	152	-	3	-	-	-	155
<b>Jumlah Penyuluh</b>	163	-	3	-	-	-	166
<b>Rasio per Agama</b>	1:5788	N/A	1:294	N/A	N/A	0	1:5707

Sumber: Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata-rata 5.707 umat beragama, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Untuk menanamkan Aqidah dan ajaran agama khususnya baca tulis Al-Qur'an pada generasi muda serta anak-anak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pekalongan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah di sekolah dasar (SD). Kegiatan tersebut dikoordinir oleh penyuluh agama fungsional PNS dan sebagai pelaksana belajar mengajar adalah penyuluh Non PNS Kabupaten Pekalongan.

Jumlah madrasah diniyah takmiliyah di sekolah dasar dapat dilihat dalam tabel 6 berikut:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah Sekolah Dasar**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah	419	433	445	539	540

Sumber: Seksi PD Pontren

Sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap penyuluh agama adalah diadakanya pemilihan penyuluh teladan yang dapat dijadikan salah satu sarana evaluasi, peningkatan kompetensi kinerja dan pengembangan diri penyuluh agama, baik penyuluh agama PNS maupun penyuluh agama Non PNS. Prestasi Penyuluh Agama Islam dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.7**  
**Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional**

Tahun	PAIF	KUA	Prestasi
2019	Hj. Ani Syarifah, S.Ag.	Kajen	Juara 1 Penyuluh Teladan Tk. Kabupaten Pekalongan
2019	H. Amat Sulaiman, S.H.I.	Buaran	Juara 2 Penyuluh Teladan Tk. Kabupaten Pekalongan
2019	Nurjanah, S.H.I.	Wonokerto	Juara 3 Penyuluh teladan Tk. Kabupaten Pekalongan
2019	Hj. Musbiroh, S.Ag.	Kedungwuni	Juara I MTQ KORPRI Tk. Jateng

Sumber: Seksi Bimas Islam

**Tabel 1.8**  
**Prestasi Penyuluh Agama Islam Non PNS**

Tahun	PAIF	KUA	Prestasi
2019	Jamal Ainur Rosyad	Wonokerto	Juara 1 Penyuluh teladan PAI Non PNS Tk. Kabupaten Pekalongan
2019	Aina Ainul Maziyah	Wiradesa	Juara 2 Penyuluh teladan PAI Non PNS Tk. Kabupaten Pekalongan
2019	Amrina Rosada	Wiradesa	Juara 3 Penyuluh teladan PAI Non PNS Tk. Kabupaten Pekalongan

Sumber: Bimas Islam

#### 1.1.4.3. Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari kegiatan yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif:

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di KUA Kecamatan;

- c. Maklumat Layanan dan Kode Etik Pegawai sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh Kepala KUA;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp.600.000,- calon pengantin/wali nikah setor langsung di Bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;

Sebagai salah satu penghargaan terhadap KUA, maka diselenggarakan pemilihan KUA teladan sebagai sarana evaluasi atas kinerja dari tingkat Kota/kabupaten sampai dengan nasional. Hasil Penilaian KUA Teladan, KUA di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2015-2019 sudah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi pembinaan harus tetap dilakukan agar kinerja KUA senantiasa terpelihara dan meningkat, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia. Hasil evaluasi KUA Teladan pada Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam dilihat pada tabel berikut:

**Tabel1.9  
Data Prestasi KUA**

Tahun	Kepala KUA	KUA	Prestasi
2015	H. Moh.Irkham, S.Ag.	Kandangserang	Juara Harapan 2 KUA teladan Tk. Propinsi Jateng

*Sumber: Seksi Bimas Islam*

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama berupaya memenuhi ketersediaan dan standarisasi gedung dan bangunan. Dengan alokasi dana bersumber dari SBSN standarisasi gedung KUA dilaksanakan dengan syarat telah memiliki tanah atas nama pemerintah RI. C.q Kementerian Agama dengan luas minimal 300m<sup>2</sup>. Di Kabupaten Pekalongan pembangunan KUA dilaksanakan pada tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.10**

## Data Tanah dan Bangunan KUA

No	KUA	Tanah		Bangunan					
		Luas	Status	Luas	Status	Kondisi	Daya	Bertingkat	SBSN
1	KUA Kecamatan Wonopringgo	450 M <sup>2</sup>	Pemda	108 M <sup>2</sup>	Sekjen	Rusak Ringan	900 Watt	Tidak	Tidak
2	KUA Kecamatan Tirto	308 M <sup>2</sup>	Pemda	144 M <sup>2</sup>	Sekjen	Baik	900 Watt	Tidak	Tidak
3	KUA Kecamatan Talun	525 M <sup>2</sup>	Kemenag	288 M <sup>2</sup>	Bimas Islam	Baik	3500 Watt	Tidak	Ya
4	KUA Kecamatan Siwalan/Sragi II	560 M <sup>2</sup>	Pemda	308 M <sup>2</sup>	Sekjen	Baik	1300 Watt	Tidak	Tidak
5	KUA Kecamatan Sragi	185 M <sup>2</sup>	Wakaf	154 M <sup>2</sup>	Sekjen	Rusak Ringan	900 Watt	Tidak	Tidak
6	KUA Kecamatan Paninggaran	240 M <sup>2</sup>	Kemenag	128 M <sup>2</sup>	Sekjen	Rusak Ringan	900 Watt	Tidak	Tidak
7	KUA Kecamatan Kesesi	322 M <sup>2</sup>	Kemenag	230 M <sup>2</sup>	Bimas Islam	Baik	3500 Watt	Ya	Ya
8	KUA Kecamatan Doro	425 M <sup>2</sup>	Kemenag	217 M <sup>2</sup>	Bimas Islam	Baik	1300 Watt	Ya	Ya
9	KUA Kecamatan Buaran	431 M <sup>2</sup>	Kemenag	152 M <sup>2</sup>	Bimas Islam	Baik	1300 Watt	Ya	Ya
10	KUA Kecamatan Bojong	250 M <sup>2</sup>	Kemenag	250 M <sup>2</sup>	Sekjen	Rusak Ringan	1300 Watt	Tidak	Tidak
11	KUA Kecamatan Karanganyar	560 M <sup>2</sup>	Pemda	110 M <sup>2</sup>	Sekjen	Rusak Ringan	900 Watt	Tidak	Tidak
12	KUA Kecamatan Wonokerto	250 M <sup>2</sup>	Sewa	210 M <sup>2</sup>	Sewa	Baik	900 Watt	Tidak	Tidak
13	KUA Kecamatan Karangdadap	640 M <sup>2</sup>	Kemenag	228 M <sup>2</sup>	Bimas Islam	Baik	900 Watt	Tidak	Ya
14	KUA Kecamatan Petungkriyono	506 M <sup>2</sup>	Wakaf	153 M <sup>2</sup>	Sekjen	Rusak Ringan	900 Watt	Tidak	Tidak
15	KUA Kecamatan Wiradesa	570 M <sup>2</sup>	Kemenag	280 M <sup>2</sup>	Bimas Islam	Baik	900 Watt	Ya	Ya
16	KUA Kecamatan Kedungwuni	300 M <sup>2</sup>	Pemda	180 M <sup>2</sup>	Sekjen	Baik	900 Watt	Tidak	Tidak
17	KUA Kecamatan Kajen	815 M <sup>2</sup>	Kemenag	210 M <sup>2</sup>	Bimas Islam	Baik	900 Watt	Ya	Ya
18	KUA Kecamatan Kandangserang	280 M <sup>2</sup>	Kemenag	143 M <sup>2</sup>	Sekjen	Rusak Ringan	900 Watt	Tidak	Tidak
19	KUA Kecamatan Lebakbarang	250 M <sup>2</sup>	Pemda	135 M <sup>2</sup>	Sekjen	Rusak Ringan	1300 Watt	Tidak	Tidak

Sumber: Seksi Bimas Islam

Dari tabel di atas diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 10 KUA berdiri pada tanah sendiri, 4 KUA berdiri pada tanah pemda dan atau tanah desa, 1 menggunakan sewa tanah dan gedung dan 7 gedung KUA dibangun melalui dana SBSN.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, di 19 KUA telah dilakukan Survey Kepuasan Layanan melalui IKM pada tahun 2019. Dari survey IKM tersebut menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 82,56. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 11 dimensi, yaitu : 1) Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, 2) Kejelasan Petugas Pelayaan, 3) Kedisiplinan dan tanggungjawab, 4) Kemampuan Petugas, 5) Kepastian Jadwal dan Kecepatan Pelayanan, 6) Keadilan Mendapatkan Pelayanan, 7) Kesopanan dan Keramahan Petugas, 8) Kewajaran Biaya Pelayanan, 9) Kepastian Biaya Layanan, 10) Kenyamanan Lingkungan dan 11) Keamanan Pelayanan. Hal ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan KUA sudah Sangat memuaskan.

#### 1.1.4.4. Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi di bidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah:

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;
- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;

- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

Adapun jumlah penghulu di Jajaran Kankemenag Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 22 orang.

**Tabel 1.11**  
**Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penghulu	24	23	23	22	22

Sumber: Seksi Bimas Islam

#### 1.1.4.5. Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Pekalongan

Jumlah jamaah haji yang berangkat melalui Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan jamaah haji selama berada di Asrama Haji Donohudan mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.12**  
**Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SOC**

TAHUN				
2015	2016	2017	2018	2019
85,26	86,83	86,85	87,23	87,91

Sumber: Seksi PHU

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, maka dilaksanakan program “Manasik Mandiri Sepanjang Masa”, program ini dilaksanakan setiap seminggu sekali di KUA Kecamatan, dengan program ini maka calon jamaah haji bisa mempersiapkan diri lebih dini, karena memperoleh peatihan dan bimbingan tata cara ibadah haji yang lebih tuntas, baik tata cara beribadah, tata cara hidup, tata cara menjaga kesehatan dan kebugaran serta beradaptasi secepat mungkin dengan iklim di Arab Saudi. Bimbingan ini bertempat di wilayah sekitar jamaah yaitu di Aula KUA dan atau pendopo kecamatan setempat sehingga dapat dijangkau, pelaksanaannya pun tidak dipungut biaya.

#### Gambar 1.5



## Pelaksanaan Manasik Haji Mandiri Sepanjang Masa



**Gambar1.6**  
**Pelaksanaan Pembuatan Paspur Kolektif**



Selain kegiatan manasik calon jamaah haji tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan juga menyelenggarakan kegiatan pengurusan paspor. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu calon jamaah haji dalam pengurusan paspor di kantor imigrasi Pemalang. Kegiatan ini diterima dengan baik pihak imigrasi dan calon jamaah haji, karena selain bisa meringankan pihak imigrasi dalam melayani, jamaah juga diuntungkan dengan kepastian waktu untuk mengurus pembuatan paspor sehingga jamaah cukup datang sekali paspor sudah bisa selesai.

### **1.1.4.6. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Pekalongan, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama,

Keberhasilan dari mutu pendidikan tersebut dapat dilihat dari indikator berikut: 1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman. Pengukuran keberhasilan dari indikator tersebut berada pada level Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.

Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.13**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Kab. Pekalongan**

No	Jenis	Unit Kerja Pengampu	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum berciri khas Agama	Seksi Pendidikan Madrasah	RA	108	8.131
			MI	122	24.768
			MTs	35	9.949
			MA	16	2.710
2	Pendidikan Keagamaan	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Wustha	1	687
			Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ulya	1	179

Sumber: Seksi Pendma dan PD Pontren

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Peserta Didik**



Sumber Seksi Penma

Berdasarkan grafik jumlah peserta didik RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan melalui lembaga pendidikan

yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTs, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

**Tabel 1.14**  
**Jumlah Alokasi BOP dan BOS bagi Lembaga Pendidikan Umum**  
**berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan**

Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
Pendidikan Umum berciri khas Agama	Islam	BOS	MI	6.414	3.332	4.000	4.958	4.204
		BOS	MTs	2.967	1.914	2.500	2.106	1.685
		BOS	MA	2.666	2.289	2.589	2.749	2.710
Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Ula	180	187	212	234	224
			Tingkat Wustha	755	868	890	1.004	1.032
			Tingkat Ulya	-	-	-	108	131

Sumber: Seksi Pendma dan PD Pontren

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.

**Tabel 1.15**  
**Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP**

No	Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2016 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2018 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2019 (siswa/santri)
1	MI	6.414	3.332	4.000	4.958	4.204
2	MTs	2.967	1.914	2.500	2.106	1.685
3	MA	699	618	675	661	563
4	Ula	21	105	97	115	103
5	Wustha	149	580	700	626	597
6	Ulya	84	375	350	433	438

Sumber: Seksi Pendma dan PD Pontren

#### 1.1.5. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama.

**Tabel 1.16**  
**Data Nilai Rata-Rata Hasil UN**

Jenjang	2016	2017	2018	2019
MTs	52.31	50.58	50.65	51,97
MA	53.84	51.82	51.75	52.48

Sumber: Seksi Penma

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah di atas menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama Islam tahun 2015 s.d. 2019 di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.17**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	80.34	83.01	83.91	83,8
2	2016	79.72	83.83	83.2	81,46

3	2017	81,56	83.57	80	83
4	2018	79.87	71.13	79.93	77.3
5.	2019	82.56	83.49	82.46	82.3

Sumber: Seksi PAIS

**Tabel 1.18**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG / NILAI RATA-RATA	
		MIN	MTsN
1	2016	79.25	78.61
2	2017	80.04	77.21
3	2018	73.15	73.46
4	2019	64.34	61.68

Sumber: satker Madrasah Negeri

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan rata-rata nilai USBN Agama. Salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di samping data terkait rerata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.

#### **1.1.6. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan ditandai dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan sejak tahun 2016, capaian pembangunan Zona Integritas terus meningkat pada setiap tahunnya.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari pengejawantahan 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator- indikator dari 6 (enam) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, uraian dari area perubahan tersebut adalah:

##### **a. Manajemen Perubahan**

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Capaian melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kementerian Agama

- Kabupaten Pekalongan sebagai Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK /WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  4. Ditetapkannya agen perubahan masa kerja 2018 sd 2020;
  5. Ditetapkannya prosedur pemberian reward, punishment bagi pemberi layanan dan kompensasi bagi penerima layanan;
  6. Dibangunnya ZI Corner sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
- b. Penataan Tatalaksana
- Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian pada area ini adalah:
1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menggunakan berbagai aplikasi dalam melakukan proses bisnisnya. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan kinerja unit menggunakan aplikasi e-MPA, e-MONEV, SMART, SIEKA, dsb. Untuk aplikasi manajemen kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menggunakan aplikasi SIMPEG. Dalam pelayanan publik, digunakan juga berbagai aplikasi yaitu: aplikasi Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIMKAH, SSKOHAT, PPDB online. Pada tahun 2020 ini direncanakan pembangunan aplikasi e-disposisi dan pembaharuan aplikasi PTSP.
  2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
  3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dapat dilihat dari capaian pembangunan zona integritas Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
- c. Penguatan Akuntabilitas
- Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Capaian dari program ini adalah:
1. Keterlibatan Pimpinan: pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.
  2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja.
  3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;
  4. Mengadakan rapat pemantauan pencapaian kinerja bulanan.
  5. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan.
  6. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
  7. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)*. Memiliki IKU tambahan yang *SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)*
  8. Laporan kinerja disusun tepat waktu.
  9. Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya)
  10. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja.
  11. Laporan kinerja (LKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja.

12. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Mengirimkan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti diklat dan bimtek
  13. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
- d. Penataan Sistem SDM
- Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian dari program ini adalah:
1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan;
  2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan;
  4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan;
  5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  6. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai setiap bulan.
- e. Penguatan Pengawasan
- Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang bersih dan bebas KKN. Capaian dari program ini adalah:
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
  2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
  3. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan Keuangan;
  4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan dibentuknya unit pengendali gratifikasi, tim penanganan benturan kepentingan, satgas SPIP, tim penanganan pengaduan masyarakat dan tim penanganan whistle blowing system
  5. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan pengawasan, serta menyegerakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
  6. Diterapkannya program pengawasan dengan pendekatan agama bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan;
  7. Dicitak sticker, banner, leaflet dan standing banner sebagai public campaign
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) dengan adanya berbagai aplikasi yang menunjang pelayanan publik seperti: PTSP, Simkah, Siskohat, Siwak, Simbi, Simas, dsb;
  2. Indeks kepuasan masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada di tingkat sangat memuaskan.

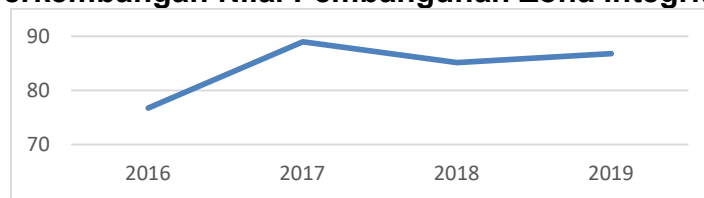
Komponen hasil dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, adalah pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, salah satu capaian dari komponen ini adalah saldo TLHP BPK kosong dan tindaklanjut telah dikirim pada tanggal 26 Februari 2020.

**Tabel 1.19**  
**Indeks Pembangunan Zona Integritas**

Tahun	Indeks Zona Integritas	Capaian
2016		Nilai komponen pengungkit memenuhi syarat WBK
2017	49.49	Nilai komponen pengungkit memenuhi syarat WBK
2018	49.08	Nilai komponen pengungkit memenuhi syarat WBK
2019	49.11	Nilai komponen pengungkit memenuhi syarat WBK

Sumber: Bagian Kepegawaian

**Grafik 1.2**  
**Perkembangan Nilai Pembangunan Zona Integritas**



Sumber: Bagian Kepegawaian

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada masa-masa mendatang.

### 1.2.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pekalongan dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah: adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan



keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi.

### **1.2.2. Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama:

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Kabupaten Pekalongan.
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- b. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

### **1.2.3. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di Seksi penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jamaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jamaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jamaah haji, dengan adanya persiapan dari masing-masing jamaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;

- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jamaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

#### **1.2.4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

#### **1.2.5. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri, terdapat banyak lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
- d. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
- e. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan:

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
- d. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020–2024 adalah “Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu:

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

### **2.1. Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan**

Kementerian Agama pada Renstra tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Sebagai instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mendukung pelaksanaan tujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di atas. Adapun tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Menguatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Meningkatnya peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; dan
5. Meningkatnya budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

## 2.2. Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menetapkan 54 sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menetapkan 50 Sasaran Kegiatan untuk mendukung sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Adapun sasaran kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Meningkatnya kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial

Tujuan-1 Meningkatnya kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dapat dicapai dengan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS1)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- Nilai kinerja penyuluh agama;
- Persentase penyuluh agama yang dibina;
- Jumlah penziar agama yang dibina kompetensi;
- Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

### 2.2.2. Menguatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama

Tujuan-2 Menguatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dapat tercapai dengan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama</li> <li>2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama</li> <li>4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
  - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
  - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
  - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
  - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
  - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
  - b. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;

- c. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
  - d. Persentase siswa di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
  - e. Persentase pengawas di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
  - f. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
  - g. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
  - b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat.

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS3)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Menguatnya dialog agama dan budaya yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, yaitu: jumlah kegiatan ekspresi Budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll);
3. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina.

### **2.2.3. Meningkatnya umat beragama yang menerima layanan keagamaan**

Tujuan-3 Meningkatnya umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS4)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur Keagamaan</li> <li>2. Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar</li> <li>3. Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
  - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
  - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
  - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
  - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
  - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
  - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
  - e. Jumlah penghulu yang dibina;
  - f. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/keluarga bahagia.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
  - b. Persentase calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu;
7. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji;
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase keberlanjutan layanan (continuity service).

**Tabel 2.5**  
**Sasaran Stratis dan Sasaran Program (SS5)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan zakat dan wakaf

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase amil yang dibina;

- b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
- 2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
  - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
  - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

**2.2.4. Meningkatnya peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan berkualitas**

Tujuan-4 Meningkatnya peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas, dapat tercapai dengan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
  - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase guru di madrasah, ustadz Pendidikan diniyah/muadalah dan guru Pendidikan Agama Islam yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
  - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah;
  - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah;
  - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
  - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

**Tabel 2.7**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS7)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan



Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - b. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - c. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - d. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;
  - b. Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah;
  - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah;
  - d. Persentase siswa penerima PIP pada PDF Muadalah;
  - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

**Tabel 2.8**  
**Sasaran Stratis dan Sasaran Program (SS8)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan  2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase guru madrasah/ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
  - b. Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
  - c. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi;
  - d. Persentase guru madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
  - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
  - b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG;
  - c. Persentase guru pendidikan agama yang berkualifikasi minimal S1.

**Tabel 2.9**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS9)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
  - a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;
  - b. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

**Tabel 2.10**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan Pendidikan karakter dalam pembelajaran;
  - b. Persentase kepala Pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
  - c. Presentase madrasah yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;

- b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

**2.2.5. Meningkatnya budaya birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani**

Tujuan-5 Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, dapat tercapai dengan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS12)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
  - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
  - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
  - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
  - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
  - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
  - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
  - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
  - f. Persentase data ASN yang diupdate.
3. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
  - b. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
  - c. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
4. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
  - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
  - c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.
5. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi

- standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
- b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
  - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
6. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas.
  7. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
    - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
    - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra.
  8. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
    - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
    - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
  9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.
  10. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
    - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
    - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
    - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen.
  11. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indikator kinerja kegiatan yakni: Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.
  12. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
    - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
    - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
  13. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
    - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
    - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
  14. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

### **2.3. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

Dalam pelaksanaan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kantor Kabupaten Pekalongan dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran kegiatan. Adapun rumusan indikator kinerja kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.12**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja**  
**Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	1. Evaluasi kinerja penyuluh agama	Bimas Islam Gara Katolik	Bimas Islam Gara Katolik	Tahunan
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	2. Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluh agama			Tahunan
		3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensinya			Tahunan
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan			Tahunan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	1. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	2. Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan			Tahunan
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	3. Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan.			Tahunan

3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi</li> <li>2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Lembaga agama, Organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitas</li> <li>2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Layanan Sekber FKUB	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama</li> <li>2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat</li> <li>2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	Bimas Islam, Gara Katolik	Bimas Islam, Gara Katolik	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat dibagi jumlah seluruh penyuluh agama	Bimas Islam Gara Katolik	Bimas Islam Gara Katolik	Tahunan
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rumah ibadah yang ramah</li> <li>2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina toleran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi jumlah seluruh rumah ibadah</li> <li>2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah</li> </ol>	Bimas Islam Gara Katolik	Bimas Islam Gara Katolik	Tahunan

8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang public	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam Gara Katolik	Bimas Islam Gara Katolik	Tahunan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</li> <li>2. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama</li> <li>3. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</li> <li>4. Persentase siswa di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</li> <li>2. Jumlah guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi dengan jumlah seluruh guru di madrasah</li> <li>3. Jumlah guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama dibagi dengan jumlah seluruh guru pendidikan agama di sekolah umum</li> <li>4. Jumlah siswa di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama dibagi dengan jumlah siswa di sekolah umum</li> </ol>	Seksi Penma, Pais	Seksi Penma, Pais	Tahunan

		<p>5. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>6. Persentase pengawas Pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>7. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p>	<p>5. Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah seluruh pengawas pendidikan agama di madrasah</p> <p>6. Jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah seluruh pengawas Pendidikan agama</p> <p>7. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p>	Seksi Penma, Pais	Tahunan	Tahunan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<p>1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat</p> <p>2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an</p>	<p>1. Jumlah pesantren yang berwawasan moderat dibagi Jumlah seluruh pesantren</p> <p>2. Jumlah Kenaikan Peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al- Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali</p>	Seksi Pontren	Seksi Pontren	Tahunan
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan



12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ/STQ)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ/STQ)	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
13	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan</li> <li>2. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi</li> <li>3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan</li> <li>4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan</li> <li>2. Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah seluruh lembaga keagamaan</li> <li>3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan</li> <li>4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat</li> </ol>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan

15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu yang dibina</li> <li>6. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu yang dibina</li> <li>6. Jumlah buku dan kartu yang disediakan</li> </ol>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ Bahagia	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka Sakinah/bahagia	Bimas Islam Gara Katolik	Bimas Islam Gara Katolik	Tahunan
17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	PHU	PHU	Tahunan

18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>2. Persentase calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah pusat layanan haji</li> <li>2. Jumlah calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jamaah haji</li> </ol>	PHU	PHU	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jamaah haji	PHU	PHU	Tahunan
20	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jamaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi Jumlah jamaah haji	PHU	PHU	Tahunan
21	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat	PHU	PHU	Tahunan
22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase amil yang dibina</li> <li>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil</li> <li>2. Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat</li> </ol>	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan

23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembaga wakaf yang dibina</li> <li>2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan</li> <li>3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah lembaga wakaf</li> <li>2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf</li> <li>3. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf</li> </ol>	Gara zawa	Gara zawa	Tahunan
24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</li> <li>2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah</li> <li>2. Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode</li> </ol>	Seksi Penma Seksi Pontren	Seksi Penma Seksi Pontren	Tahunan
25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah umum yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah dan guru Pendidikan agama di sekolah umum yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah</li> </ol>	Seksi Penma Seksi PAIS	Seksi Penma Seksi PAIS	Tahunan

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen</li> </ol>	Seksi Penma Seksi PAIS	Seksi Penma Seksi PAIS	Tahunan
26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran</li> </ol>	Seksi Penma Seksi Pontren	Seksi Penma Seksi Pontren	Tahunan
27	Meningkatnya kualitas sarana dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RA yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Jumlah MA/Ulya/ yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren</li> </ol>	Seksi Penma Seksi Pontren	Seksi Penma Seksi Pontren	Tahunan

28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah;</li> <li>3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah</li> <li>4. Persentase siswa penerima PIP pada PDF Muadalah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah;</li> <li>3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah</li> <li>4. Persentase siswa penerima PIP pada PDF Muadalah;</li> </ol>	Seksi Penma Seksi Pontren	Seksi Penma Seksi Pontren	Tahunan
29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	Seksi Pontren	Seksi Pontren	Tahunan
30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Penma	Seksi Penma	Tahunan
31	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi</li> <li>2. Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan di madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah guru madrasah yang lulus sertifikasi dibagi jumlah seluruh guru madrasah</li> <li>2. Jumlah kepala/guru/tenaga kependidikan di madrasah dan Pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah seluruh kepala/guru/tenaga kependidikan di madrasah dan Pendidikan diniyah/muadalah</li> <li>3. Jumlah guru Pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah seluruh guru pendidikan agama</li> </ol>	Seksi Penma, Seksi PAIS, Seksi Pontren	Seksi Penma, Seksi PAIS, Seksi Pontren	Tahunan

		4. Persentase guru madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP	4. Jumlah guru madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP dibagi jumlah seluruh guru madrasah			
32	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru madrasah dan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase tenaga kependidikan di madrasah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi jumlah seluruh guru 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Seksi Penma Seksi PAIS Gara Katolik	Seksi Penma Seksi PAIS Gara Katolik	Tahunan
33	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	Seksi Penma Seksi PAIS Gara Katolik	Seksi Penma Seksi PAIS Gara Katolik	Tahunan
34	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Seksi Penma	Seksi Penma	Tahunan
35	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu 3. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Jumlah madrasah yang menerapkan budaya mutu dibagi dengan jumlah seluruh madrasah 2. Jumlah siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Seksi Penma Seksi Pontren	Seksi Penma Seksi Pontren	Tahunan

36	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/pesantren yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase MTs/MA/ Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman</li> <li>3. Persentase madrasah yang ramah anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi dengan jumlah seluruh MTs/MA/Pesantren</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman dibagi dengan jumlah seluruh kepala Pendidikan diniyah/muadalah</li> <li>3. Jumlah madrasah yang ramah anak dibagi dengan jumlah seluruh madrasah</li> </ol>	Seksi Penma Seksi Pontren	Seksi Penma Seksi Pontren	Tahunan
37	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina</li> </ol>	Seksi Penma Seksi Pontren	Seksi Penma Seksi Pontren	Tahunan
38	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah produk hukum yang diterbitkan</li> <li>2. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan</li> <li>3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan



39	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Persentase data ASN yang diupdate</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti dibagi jumlah seluruh laporan permasalahan kepegawaian</li> <li>3. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) dibagi dengan jumlah seluruh ASN</li> <li>5. Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya dibagi dengan jumlah seluruh ASN</li> <li>6. Jumlah data ASN yang diupdate</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Semester
----	---	--	---	-----------	-----------	----------

40	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu</li> <li>2. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>3. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu</li> <li>2. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>3. Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Semester
41	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Jumlah tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
42	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
43	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan

44	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data dibagi dengan jumlah output perencanaan</li> <li>2. Jumlah indikator Renja yang selaras dengan Renstra</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
45	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
46	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar dibagi dengan jumlah kebutuhan prasarana	Subbag TU	Subbag TU	Tahunan
47	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dibagi dengan jumlah surat masuk</li> <li>2. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik dibagi dengan jumlah dokumen</li> <li>3. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen dibagi dengan jumlah surat</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Triwulan

48	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Survey	Subbag TU	Subbag TU	Semester
49	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter dibagi dengan jumlah berita negatif</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Triwulan
50	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Jumlah data agama dan pendidikan yang valid dan reliable dibagi dengan jumlah data agama dan pendidikan</li> </ol>	Subbag TU	Subbag TU	Semester
51	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Subbag TU	Subbag TU	Triwulan

## **2.4. Nilai-nilai Kementerian Agama**

Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan di Seksi agama dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-Nilai Dasar, meliputi:

### **1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa**

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

### **2. Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang mereayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun oranglain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

### **3. Profesionalitas**

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepatwaktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

### **4. Tanggung Jawab**

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggungjawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

## 5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1. Target Kinerja**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menjalankan 7 (tujuh) program dari 9 (program) Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
7. Program Kerukunan Umat Beragama.

Mulai tahun 2021, Program yang ada di disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen,
2. Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama,
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran,
4. Program Paud Dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
14. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
15. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
16. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
17. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
18. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
19. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
20. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
21. Pelayanan Haji Dalam Negeri
22. Pembinaan Haji
23. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu



24. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
25. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
26. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
27. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
28. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
29. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
30. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
31. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 51 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan**  
**Sampai dengan Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Baseline 2019	Target 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama	1	Nilai kinerja penyuluh agama	80	95	Nilai	Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	80	100	%	
		3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	0	10	Orang	
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	9	9	Kelompok	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	%	Subbag Tata Usaha
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	30	150	Orang	
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	1	2	Desa	
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	30	150	Lembaga/ Orang	Subbag Tata Usaha
		2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	1	5	Kegiatan	

4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		100	100	%	Subbag Tata Usaha
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	25	80	%	Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1	5	Kegiatan	
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		100	100	%	Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase rumah ibadah yang ramah	90	100	%	Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
		2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina	19	95	Orang	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		0	60	Konten/ Kegiatan	Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	100	%	Seksi Penma dan Seksi PAIS
		2	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	%	
		3	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	%	

		4	Persentase siswa di sekolah umum yang dibina moderasi beragama	100	100	%	
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina moderasi beragama	100	100	%	
		6	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina moderasi beragama	100	100	%	
		7	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	0	4	Kegiatan	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	100	100	%	Seksi Pontren
		2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	1	3	%	
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan		1	5	Kegiatan	Subbag Tata Usaha
12	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ/STQ)		1	5	Event	Seksi Bimas Islam
13	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Jumlah direktori pustaka agama		1	5	Dokumen	Seksi Bimas Islam

14	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1	Jumlah sarana prasarana layanan peribadatan yang disediakan	0	5	Paket	Seksi Bimas Islam
		2	Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi	3	12	Lembaga	
		3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	1	5	Layanan	
		4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	5	25	Lokasi	
15	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	0	7	KUA	Seksi Bimas Islam
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	2	19	KUA	
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	1564	5500	Orang	
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	260	600	Orang	
		5	Jumlah penghulu yang dibina	22	26	Orang	
		6	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	9163	45000	Buku/Kartu	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/bahagia		70	375	Keluarga	Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
17	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi		0	100	%	Seksi PHU

18	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100	100	%	Seksi PHU
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0	1	%	
19	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		100	100	%	Seksi PHU
20	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		100	100	%	Seksi PHU
21	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)		75	100	%	Seksi PHU
22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang yang dibina	70	100	%	Gara Zawa
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	70	100	%	
23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	70	100	%	Gara Zawa
		2	Jumlah Akta ikrar wakaf yang diterbitkan	100	600	Akta	
		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	50	70	%	
24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	60	80	%	Seksi Penma dan Seksi Pontren

	dan pola pembelajaran inovatif	2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum	50	100	%	
		3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	0	4	Madrasah	
25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah, ustadz pendidikan diniyah/muadalah, dan guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	100	%	Seksi Penma, Seksi PAIS dan Seksi Pontren
		2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	0	25	Penghargaan	
		3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa	0	4	Kegiatan	
		4	Persentase siswa yang mengikuti assesmen kompetensi siswa	0	25	%	
26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	20	25	%	Seksi Penma dan Seksi Pontren
		2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	20	25	%	
27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	6	12	%	Seksi Penma dan Seksi Pontren
		2	Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	8	15	%	

		3	Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	8	22	%	
		4	Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	13	44	%	
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	50	100	%	
28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	37327	37897	Siswa	Seksi Penma dan Seksi Pontren
		2	Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah	1138	2300	Siswa	
		3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah	25	25	%	
		4	Persentase siswa penerima PIP pada PDF Muadalah;	40	40	%	
		5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	15	20	%	
29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren		10	22	%	Seksi Pontren
30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP		8131	8500	Siswa	Seksi Penma
31	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru madrasah/ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	60	70	%	Seksi Penma, Seksi PAIS dan Seksi Pontren



		2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	70	90	%	
		3	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	70	90	%	
		4	Persentase guru madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP	70	90	%	
32	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95	100	%	Seksi Penma dan Seksi PAIS
		2	Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	40	80	%	
33	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	0	10	%	Seksi Penma dan Seksi PAIS
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	0	5	%	
		3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	90	100	%	
34	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		0	5	Lembaga/Madr asah	Seksi Penma
35	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	100	100	%	

		2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	2	%	Seksi Penma dan Seksi Pontren
36	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	75	100	%	Seksi Penma dan Seksi Pontren
		2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	50	100	%	
		3	Persentase madrasah yang ramah anak	100	100	%	
37	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	15	25	Organisasi	Seksi Penma dan Seksi Pontren
		2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	40	60	Gugus	
38	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	80	100	%	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100	100	%	
		3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	5	%	

39	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	95	Kegiatan	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	100	100	%	
		3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80	95	%	
		4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	70	90	%	
		5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	70	90	%	
		6	Persentase data ASN yang diupdate	80	90	%	
40	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	12	12	Dokumen	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	95	99,5	%	
		3	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100	100	%	
41	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	80	90	%	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	95	100	%	

		3	Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	80	90	%	
42	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	0	100	%	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	100	100	%	
		3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	%	
43	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	1	1	Satker	Subbag Tata Usaha
		2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	100	100	%	Subbag Tata Usaha
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	3	3	%	
44	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	100	%	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	60	80	%	
45	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	80	100	%	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana	70	90	%	

			pembangunan nasional yang ditindaklanjuti				
46	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	90	%	Subbag Tata Usaha
47	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80	100	%	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	90	%	
		3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	40	90	%	
48	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga		Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	75	100	%	Subbag Tata Usaha
49	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	100	800	Berita	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	100	100	%	
50	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	1	1	Sistem	Subbag Tata Usaha
		2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	70	90	%	
51	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan		Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	900	950	Orang	Subbag Tata Usaha

### 3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sampai dengan 2024 pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 2020-2024**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Kemenag Kabupaten Pekalongan</b>	<b>162.591.741</b>	-	-	-	-	<b>162.591.741</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>	<b>3.258.622</b>	-	-	-	-	<b>3.258.622</b>
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-					-
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-					-
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.575.520					2.575.520
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-					-
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-					-
Pembinaan Administrasi Umum	683.102					683.102
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-					-
<b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>23.000</b>	-	-	-	-	<b>23.000</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	23.000					23.000
<b>Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>	<b>19.356.615</b>	-	-	-	-	<b>19.356.615</b>
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	3.105.600					3.105.600
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	10.300					10.300
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.866.000					1.866.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.000					2.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	14.372.715					14.372.715
<b>Program Pendidikan Islam</b>	<b>135.367.086</b>	-	-	-	-	<b>135.367.086</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	18.571.583					18.571.583
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	2.347.850					2.347.850
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	36.349.550					36.349.550
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	29.190.617					29.190.617
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	48.907.486					48.907.486
<b>Program Bimbingan Masyarakat Kristen</b>	<b>87.500</b>	-	-	-	-	<b>87.500</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bimas Kristen	87.500					87.500
<b>Program Bimbingan Masyarakat Katolik</b>	<b>619.336</b>	-	-	-	-	<b>619.336</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	24.000					24.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	21.000					21.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggara Katolik	297.042					297.042
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Penyelenggara Katolik	277.294					277.294
<b>Program Bimbingan Masyarakat Hindu</b>	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bimas Hindu						-
<b>Program Bimbingan Masyarakat Buddha</b>	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bimas Buddha						-
<b>Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah</b>	<b>3.879.582</b>	-	-	-	-	<b>3.879.582</b>
Pelayanan Haji Dalam Negeri	3.002.847					3.002.847
Pembinaan Haji	4.135					4.135
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	872.600					872.600

**Tabel 3.3**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 2020-2024**

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>KEMENAG KAB PEKALONGAN</b>	-	<b>114.708.926</b>	<b>121.589.243</b>	<b>128.281.309</b>	<b>135.346.739</b>	<b>499.926.217</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	-	<b>104.982.958</b>	<b>110.367.168</b>	<b>115.874.027</b>	<b>121.656.228</b>	<b>452.880.381</b>
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		-	40.000	40.000	40.000	<b>120.000</b>
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		22.500	50.000	50.000	50.000	<b>172.500</b>
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		2.566.270	2.694.584	2.829.313	2.970.778	<b>11.060.944</b>
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		18.250	40.000	40.000	40.000	<b>138.250</b>
Pembinaan Administrasi Perencanaan		41.000	60.000	60.000	60.000	<b>221.000</b>
Pembinaan Administrasi Umum		783.102	822.257	863.370	906.538	<b>3.375.268</b>
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		4.500	40.000	40.000	40.000	<b>124.500</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		837.000	878.850	922.793	968.932	<b>3.607.575</b>
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		84.633.888	88.865.582	93.308.862	97.974.305	<b>364.782.637</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		15.317.786	16.083.675	16.887.859	17.732.252	<b>66.021.572</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen		87.500	87.500	91.875	96.469	<b>363.344</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		292.360	306.978	322.327	338.443	<b>1.260.108</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		378.802	397.742	417.629	438.511	<b>1.632.684</b>
<b>Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama</b>	-	<b>4.131.068</b>	<b>4.687.075</b>	<b>5.178.282</b>	<b>5.732.611</b>	<b>19.729.036</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		50.000	60.000	70.000	75.000	<b>255.000</b>
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		1.999.068	2.198.975	2.418.872	2.660.760	<b>9.277.675</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		22.000	50.000	50.000	50.000	<b>172.000</b>



Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		1.921.000	2.113.100	2.324.410	2.556.851	<b>8.915.361</b>
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		3.000	20.000	30.000	50.000	<b>103.000</b>
Pembinaan Haji dan Umroh Khusus		5.000	20.000	30.000	50.000	<b>105.000</b>
Pelayanan Haji Dalam Negeri		30.000	50.000	60.000	70.000	<b>210.000</b>
Pembinaan Haji		40.000	75.000	75.000	80.000	<b>270.000</b>
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji		25.000	50.000	60.000	70.000	<b>205.000</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		36.000	50.000	60.000	70.000	<b>216.000</b>
<b>Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran</b>	-	<b>24.000</b>	<b>295.000</b>	<b>340.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.069.000</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		1.000	60.000	75.000	90.000	<b>226.000</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam		-	75.000	85.000	100.000	<b>260.000</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		23.000	80.000	90.000	110.000	<b>303.000</b>
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		-	80.000	90.000	110.000	<b>280.000</b>
<b>Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>	-	<b>5.570.900</b>	<b>6.240.000</b>	<b>6.889.000</b>	<b>7.547.900</b>	<b>26.247.800</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik		125.000	125.000	150.000	150.000	<b>550.000</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		5.445.900	5.990.000	6.589.000	7.247.900	<b>25.272.800</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam		-	125.000	150.000	150.000	<b>425.000</b>

## PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pembangunan sektor agama maupun sektor pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.



Kepala  
Kankemenag Kabupaten  
Pekalongan

Kasiman Mahmud Desky

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR: 196 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2020-2024

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	LOKASI	SATUAN HASIL	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN</b>															
1 Meningkatkan kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	80	85	85	85	90	95						Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
	2 Persentase penyuluh agama yang dibina		%	80	80	85	100	100	100						
	3 Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi		Orang	-	1	1	3	3	3						
	4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	9	9	9	9	9	9						
2 Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	100	100	100	100	100	100						Subbag Tata Usaha
	2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	30	30	30	30	30	30						
	3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Desa	1	1	1	1	1	2						
3 Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga/Orang	30	30	30	30	30	30						Subbag Tata Usaha
	2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	1	1	1	1	1	1						
4 Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		%	100	100	100	100	100	100						Subbag Tata Usaha
5 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	25	50	60	70	80	80						Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
	2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	1	1	1	1	1	1						
6 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	100	100	100	100	100	100						Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
7 Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah		%	90	92	94	96	98	100						Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
	2 Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina		Orang	19	19	19	19	19	19						
8 Meningkatkan kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Konten/Kegiatan	-	10	10	12	14	14						Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
9 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						Seksi Penma dan Seksi PAIS
	2 Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
	3 Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
	4 Persentase siswa di sekolah umum yang dibina moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
	5 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						
	6 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina moderasi beragama		%	100	100	100	100	100	100						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	LOKASI	SATUAN HASIL	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	7	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	-	4	4	4	4	4						
10	1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	%	100	100	100	100	100	100						Seksi Pontren
					2	1,1	1,5	2,0	2,5	3					
11		Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Kegiatan	1	1	1	1	1	1						Subbag Tata Usaha
12		Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Event	1	1	1	1	1	1						Seksi Bimas Islam
13		Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Dokumen	-	1	1	1	1	5						Seksi Bimas Islam
14	1	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Paket	-	1	1	1	1	1						Seksi Bimas Islam
					2	3	3	2	2	2					
					3	1	1	1	1	1					
					4	5	5	5	5	5					
15	1	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	KUA	-	-	-	1	2	2						Seksi Bimas Islam
					2	4	4	5	5	5					
					3	1.564	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200				
					4	260	100	120	120	120	140				
					5	22	22	26	26	26	26				
					6	9.163	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
16		Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Keluarga	70	75	75	75	75	75						Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik
17		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	%	-	-	100	100	100	100						Seksi PHU
18	1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	%	100	100	100	100	100	100					Seksi PHU	
					2	1	1	1	1	1					
19		Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	%	100	100	100	100	100	100					Seksi PHU	
20		Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	%	100	100	100	100	100	100					Seksi PHU	
21		Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	%	75	80	85	90	95	100					Seksi PHU	
22	1	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	%	70	75	75	80	90	100					Gara Zawa	
					2	70	75	80	80	90	100				

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	LOKASI	SATUAN HASIL	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	70	75	80	80	90	100						Gara Zawa	
		2	Jumlah Akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Akta	100	120	120	120	120	120							
		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	50	54	58	62	66	70							
24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	60	64	68	72	76	80						Seksi Penma dan Seksi Pontren	
		2	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	50	50	50	100	100	100							
		3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Madrasah	-	-	-	4	4	4							
25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah, ustadz pendidikan diniyah/muadalah, dan guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	%	100	100	100	100	100	100						Seksi Penma, Seksi PAIS dan Seksi Pontren	
		2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Penghargaan	-	5	5	5	5	5							
		3	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa	Kegiatan	-	4	4	4	4	4							
		4	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi siswa	%	-	5	5	10	15	25							
26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	20	20	22	23	24	25						Seksi Penma dan Seksi Pontren	
		2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	20	20	22	23	24	25							
27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	6,5	7,4	9,3	10,2	11,1	12,0						Seksi Penma dan Seksi Pontren	
		2	Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	8,2	10,7	11,5	13,1	13,9	14,8							
		3	Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	8,3	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2							
		4	Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	12,5	18,75	25	31,25	37,5	43,75							
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	50	50	50	100	100	100							
28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Siswa	37.327	37.573	37.610	37.697	37.797	37.897						Seksi Penma dan Seksi Pontren	
		2	Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah	Siswa	1.138	1.220	1.508	2.016	2.200	2.300							
		3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah	%	25	25	25	25	25	25							
		4	Persentase siswa penerima PIP pada PDF Muadalah;	%	40	40	40	40	40	40							
		5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	15	15	15	20	20	20							
29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di	%	10	12	14	18	20	22						Seksi Pontren		
30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Siswa	8.131	8.203	8.247	8.239	8.460	8.500						Seksi Penma		

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	LOKASI	SATUAN HASIL	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
31 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru madrasah/ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi		%	60	62	64	66	68	70						Seksi Penma, Seksi PAIS dan Seksi Pontren
	2 Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	70	75	80	80	85	90						
	3 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	70	75	80	80	85	90						
	4 Persentase guru madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP		%	70	75	80	80	85	90						
32 Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	95	96	97	98	99	100						Seksi Penma dan Seksi PAIS
	2 Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	40	45	50	60	70	80						
33 Meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG		%	-	-	2	4	8	10						Seksi Penma dan Seksi PAIS
	2 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG		%	-	-	2	3	4	5						
	3 Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1		%	90	92	94	96	98	100						
34 Menguatnya kapasitas dan akselesasi akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga/Madrasah	-	1	1	1	1	1						Seksi Penma
35 Meningkatkan budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu		%	100	100	100	100	100	100						Seksi Penma dan Seksi Pontren
	2 Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	1	1	1	2	2	2						
36 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	75	80	85	90	95	100						Seksi Penma dan Seksi Pontren
	2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	50	50	100	100	100	100						
	3 Persentase madrasah yang ramah anak		%	100	100	100	100	100	100						
37 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Organisasi	15	17	19	21	22	25						Seksi Penma dan Seksi Pontren
	2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina		Gugus	40	44	48	52	56	60						
38 Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan		%	80	90	100	100	100	100						Subbag Tata Usaha
	2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan		%	100	100	100	100	100	100						
	3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan		%	1	1	1	1	1	1						
39 Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja		Kegiatan	80	83	86	89	92	95						Subbag Tata Usaha
	2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti		%	100	100	100	100	100	100						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	LOKASI	SATUAN HASIL	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	80	83	86	89	92	95						
	4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	70	74	78	82	86	90						
	5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	70	74	78	82	86	90						
	6	Persentase data ASN yang diupdate	%	80	82	84	86	88	90						
40	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan		Dokumen	12	12	12	12	12	12						Subbag Tata Usaha
	2	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	95	96	97	98	99	99,5						
	3	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	100	100	100	100	100	100						
41	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel			80	82	84	86	88	90						Subbag Tata Usaha
	2	Persentase tanah yang bersertifikat	%	95	96	97	98	99	100						
	3	Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	%	80	82	84	86	88	90						
42	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi			-	100	100	100	100	100						Subbag Tata Usaha
	2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100						
	3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100						
43	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi			100	100	100	100	100	100						Subbag Tata Usaha
	2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	1	1	1	1	1	1						Subbag Tata Usaha
	3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	-	-	3	3	3	3						
44	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran			80	84	88	92	96	100						Subbag Tata Usaha
	2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	60	64	68	72	76	80						
45	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran			80	84	88	92	96	100						Subbag Tata Usaha
	2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70	74	78	82	86	90						
46	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor			80	82	84	86	88	90						Subbag Tata Usaha
	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	80	84	88	92	96	100						Subbag Tata Usaha
	2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	80	82	84	86	88	90						
	3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	40	50	60	70	80	90						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	LOKASI	SATUAN HASIL	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
48	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga		%	75	80	85	90	95	100						Subbag Tata Usaha
49	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Berita	100	200	350	500	650	800					Subbag Tata Usaha
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	%	100	100	100	100	100	100					
50	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	Sistem	1	1	1	1	1					Subbag Tata Usaha	
		2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	70	74	78	82	86	90					
51	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan		Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	900	910	920	930	940	950					Subbag Tata Usaha